



Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu di SMP Negeri 1 Bangilan

Savira Dwi Nastitiana¹

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Indonesia

email: saviranastitiana05@gmail.com

Abstrak

History Artikel:
Diterima 1 Mei 2026
Direvisi 15 Mei 2026
Diterima 30 Mei 2026
Tersedia online 1 Juni 2026

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bangilan. Fokus penelitian mencakup implementasi kebijakan penerimaan peserta didik, peningkatan kualitas pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta program bantuan bagi siswa kurang mampu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan kebijakan yang selaras dengan regulasi pemerintah, terutama melalui sistem zonasi dan program bantuan pendidikan untuk memperluas akses belajar. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui pengembangan kompetensi guru, implementasi kurikulum, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung prestasi siswa. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, perbedaan kemampuan belajar siswa, dan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih optimal. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan di SMP Negeri 1 Bangilan memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan.

Kata kunci:

Kebijakan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, implementasi kebijakan

Pendahuluan/ مقدمة

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Kemajuan suatu daerah juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memberikan kesempatan belajar yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun lingkungan tempat tinggal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pendidikan seperti sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta penerapan Kurikulum Merdeka. Kebijakan tersebut bertujuan agar seluruh peserta didik memperoleh akses pendidikan yang sama dan dapat menikmati proses pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah pertama, SMP Negeri 1 Bangilan turut melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan tersebut. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran agar mampu menghasilkan siswa yang berprestasi dan

memiliki karakter yang baik. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat berbagai usaha yang dilakukan sekolah untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Namun, dalam penerapan kebijakan pendidikan masih ditemukan beberapa kendala, seperti perbedaan kemampuan peserta didik, keterbatasan fasilitas, maupun kesiapan tenaga pendidik dalam mengikuti perkembangan pendidikan saat ini. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi sekolah dalam mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan diterapkan di SMP Negeri 1 Bangilan dalam upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah tersebut.

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai kebijakan pendidikan dalam pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bangilan. Pendekatan deskriptif digunakan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya di lingkungan sekolah.

Hasil dan Pembahasan/ نتائج البحث

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bangilan, Bapak Sunaji, sekolah tersebut berupaya menerapkan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, SMPN 1 Bangilan mengikuti aturan zonasi yang berlaku untuk menjamin kesempatan belajar bagi siswa di wilayah sekitar. Sekolah juga memberikan perhatian khusus kepada siswa dari keluarga tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar agar hambatan ekonomi tidak menjadi penghalang dalam mengenyam pendidikan.

Komitmen terhadap pemerataan akses juga diwujudkan melalui penerimaan siswa berkebutuhan khusus. Di SMPN 1 Bangilan, siswa ABK ditempatkan dalam satu kelas bersama siswa reguler, namun penanganannya dilakukan secara khusus. Hal ini terlihat dari perbedaan soal ujian yang disesuaikan dengan kondisi siswa ABK. Untuk mendukung proses tersebut, sekolah bekerja sama dengan Puskesmas dan guru Bimbingan Konseling dalam melakukan pendampingan kesehatan psikologi serta mendeteksi permasalahan keputrian yang dialami siswa ABK.

Selain pemerataan akses, upaya peningkatan mutu pendidikan juga menjadi fokus utama. SMPN 1 Bangilan mendorong para guru untuk terus meng-upgrade diri melalui kegiatan workshop dan seminar. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas mengajar di kelas.

Menariknya, sekolah tidak menerapkan sistem kelas unggulan meskipun terdapat banyak siswa yang berprestasi. Semua siswa diperlakukan secara setara tanpa dibedakan. Menurut Bapak Sunaji, prinsip ini penting agar tidak terjadi kesenjangan perlakuan di lingkungan sekolah, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Bangilan telah berupaya mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan. Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada peserta didik di wilayah sekitar sekolah. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan yang menempatkan setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas (Rosser, 2018). Melalui sistem zonasi, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan komitmen sekolah dalam mendukung kelompok peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program bantuan pendidikan menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi angka putus sekolah akibat faktor ekonomi. Menurut Arwildayanto dkk. (2018), dukungan finansial bagi peserta didik dari keluarga miskin berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pendidikan dan keberlanjutan proses belajar. Dengan demikian, kebijakan bantuan pendidikan yang diterapkan SMP Negeri 1 Bangilan dapat dipandang sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Bangilan telah menerapkan prinsip pendidikan inklusif melalui penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Penempatan siswa ABK dalam kelas reguler mencerminkan upaya sekolah dalam menghapus diskriminasi pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan inklusif yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang mendukung keberagaman tanpa adanya segregasi (UNESCO, 2020). Penyesuaian instrumen evaluasi berupa perbedaan soal ujian bagi siswa ABK menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan individual peserta didik sehingga proses penilaian dapat berjalan secara lebih adil dan proporsional.

Kerjasama sekolah dengan Puskesmas dan guru Bimbingan Konseling dalam memberikan pendampingan kesehatan psikologis kepada siswa ABK juga menjadi indikator penting keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Menurut Efendi (2018), keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh penerimaan siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga oleh dukungan layanan pendampingan yang mampu membantu perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, tenaga kesehatan, dan konselor menjadi faktor yang mendukung optimalisasi layanan pendidikan bagi siswa ABK.

Dalam aspek peningkatan mutu pendidikan, SMP Negeri 1 Bangilan secara aktif mendorong guru untuk mengikuti workshop dan seminar sebagai bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan. Upaya tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran (Suyatno, 2020). Guru yang terus mengembangkan kompetensinya akan lebih mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan perkembangan kurikulum, teknologi pendidikan, serta kebutuhan peserta didik. Implementasi hasil pelatihan dalam kegiatan pembelajaran juga menunjukkan adanya budaya belajar profesional yang berkembang di lingkungan sekolah.

Temuan lain yang menarik adalah tidak diterapkannya sistem kelas unggulan meskipun terdapat banyak siswa berprestasi. Kebijakan ini mencerminkan komitmen sekolah terhadap prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Menurut Hattie (2017), pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan akademik tertentu berpotensi menciptakan kesenjangan sosial maupun akademik di lingkungan sekolah. Dengan menempatkan seluruh siswa dalam kelas yang heterogen, sekolah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kolaboratif,

dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan di SMP Negeri 1 Bangilan menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan zonasi, bantuan pendidikan, layanan pendidikan inklusif, pengembangan kompetensi guru, serta penerapan prinsip kesetaraan dalam pembelajaran merupakan bentuk nyata komitmen sekolah dalam mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi masyarakat setempat (Tilaar & Nugroho, 2016).

Kesimpulan/ الخلاصة

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 1 Bangilan telah menerapkan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan regulasi pemerintah. Pemerataan akses diwujudkan melalui pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB, Program Indonesia Pintar, serta penerimaan dan pendampingan siswa berkebutuhan khusus dengan penanganan khusus di kelas reguler. Sementara itu, peningkatan mutu dilakukan melalui pengembangan kompetensi guru melalui workshop dan seminar, serta penerapan hasil pelatihan dalam proses pembelajaran di kelas.

Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh komitmen sekolah untuk memperlakukan seluruh siswa secara setara tanpa adanya kelas unggulan, sehingga tidak terjadi kesenjangan perlakuan di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, tantangan berupa perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan fasilitas, dan kesiapan tenaga pendidik masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu secara optimal.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan di SMP Negeri 1 Bangilan menunjukkan kontribusi positif terhadap terciptanya layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama antara pihak sekolah, pemerintah, tenaga pendidik, dan dukungan eksternal seperti Puskesmas dan guru Bimbingan Konseling.

Referensi/ المصادر والمراجع

- Arwildayanto, A., Suling, A., & Sumar, W. T. (2018). Analisis kebijakan pendidikan: Kajian teoritis, eksploratif, dan aplikatif. CV Cendekia Press.
- Aziz, A. (2021). Kebijakan pendidikan dalam perspektif peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), 45–58.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (2022). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Efendi, M. (2018). Pengantar pendidikan inklusif. Bumi Aksara.
- Hattie, J. (2017). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge.
- Mulyasa, E. (2021). Menjadi guru penggerak merdeka belajar. Bumi Aksara.
- Rosser, A. (2018). Beyond access: Making Indonesia's education system work. Lowy Institute.
- Sallis, E. (2018). Total quality management in education (3rd ed.). Routledge.
- Suyatno. (2020). Pengembangan profesional guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Kependidikan*, 8(2), 115–126.

- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Pustaka Pelajar.
- UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education—All means all. UNESCO Publishing.
- Wibowo, A., & Subhan, M. (2022). Implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 87–99.
- Yusuf, M., & Kurniawati, N. (2023). Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(3), 301–315.
- Kemendikbudristek. (2022). Kurikulum Merdeka: Panduan pembelajaran dan asesmen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.